

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN TERHADAP TRANSGENDER

(Studi Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dan
Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)

Oleh
SEPTINA

Tidak adanya aturan mengenai perubahan jenis kelamin terhadap transgender, menyebabkan disparitas Penetapan Hakim dalam menangani perkara permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh transgender. Tesis ini membandingkan persamaan dan perbedaan dari pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan diantara 2 (dua) penetapan Hakim yang mengabulkan (Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel) dan yang menolak (30/Pdt.P/2022/PN Pwt) permohonan perubahan jenis kelamin terhadap transgender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi komparatif. Hasil penelitian ditemukan ada dua hal. *Pertama*, persamaan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt hanya mengenai formalitas permohonan, sedangkan perbedaan diantara keduanya mengenai materil pokok permohonan meliputi: dasar hukum permohonan perubahan jenis kelamin, penerapan asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum, dan interpretasi Hakim terhadap kebolehan perubahan jenis kelamin oleh transgender. *Kedua*, tidak ada persamaan akibat hukum dari Penetapan Nomor: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt terhadap administrasi kependudukan Pemohonnya, sedangkan perbedaannya adalah Penetapan 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel mengakibatkan adanya perubahan status jenis kelamin Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, sedangkan Penetapan 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel mengakibatkan Pemohonnya tidak dapat melakukan perubahan status jenis kelaminnya. Saran penulis terhadap Pembuat Undang Undang adalah segera membuat aturan lebih lanjut mengenai perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh transgender.

Kata Kunci: Disparitas, Penetapan Hakim, Perubahan Jenis Kelamin, Transgender

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF COURT ORDER FOR SEX CHANGE AGAINST TRANSGENDER (Case Study of Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL and Court Order Number: 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)

**By
SEPTINA**

The absence of regulation regarding sex change for transgender people have led to disparities in the determination of judges in handling cases of requests for sex change submitted by transgender people. This thesis compares the similarities and the differences of judge's considerations and their legal consequences for population administration between 2 (two) court decision, which the judge grant (Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel) and refuse (Court Order Number 30/Pdt.P/2022/PN Pwt) the Transgender application for sex change. This study uses a normative juridical method, by comparative study. The research results conclude two things. First, the similarities of the judge's considerations in the Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel and 30/Pdt.P/2022/PN Pwt is only regarding the formality of the application, while the differences are regarding the main subject matter of the application include: legal basis of sex change application; application of the principle of expediency, the principle of justice and the principle of legal certainty; and the Judge's interpretation of the permissibility of changing sex by transgender people. Second, there is no similarity in the legal consequences of the Court Order Number: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel and 30/Pdt.P/2022/PN Pwt on the population administration of the Applicant, while the difference is the Determination Number 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel resulted the Applicant may change the gender status on his population document from male to female, while the Determination Number 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel resulted the Applicant may not change his gender status. Researcher recommend the Legislative to make the regulations regarding sex changes for transgender people.

Keywords: Disparity, Determination of Judges, Sex Change, Transgender